

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 28
TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KEPADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi
Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



OLEH:

**BAYU PANGESTU. B
1210842001**

**Pembimbing:
Kusdarini, S.IP, M.PA
Drs. Yoserizal, M.Si**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2019**

ABSTRAK

Bayu Pangestu. B, 1210842001, Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2019. Dibimbing oleh: Kusdarini S.IP, M.PA, dan Drs. Yoserizal, M.Si. Skripsi ini terdiri dari 180 halaman dengan referensi 10 buku teori, 5 buku metode, 3 skripsi, 3 kebijakan, 1 dokumen dinas, 6 website internet

Dalam rangka untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif, pemerintah pusat mengeluarkan paket kebijakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu perwujudan tersebut ialah dengan dibentuknya sebuah organisasi perangkat pemerintah yang berwenang dalam bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan satu pintu. Di Kota Padang OPD yang memiliki kewenangan tersebut adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tujuan dari DPMPTSP tersebut ialah memangkas birokrasi yang ada dalam proses perizinan. Selama ini, perizinan-perizinan yang ada tersebar di berbagai macam OPD yang ada di Kota Padang. Kebijakan tersebut termaktub dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada DPMPTSP. Akan tetapi, kenyataannya perwujudan pelayanan terpadu satu pintu tersebut masih belum efektif. Masih banyak perizinan yang belum didelegasikan. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik mengkaji Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada DPMPTSP Kota Padang.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Teori yang peneliti gunakan adalah teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Data yang peneliti gunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, dan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada DPMPTSP Kota Padang masih belum efektif. Hal itu terjadi karena ada perizinan yang belum didelegasikan. Penyebabnya adalah pada variabel Sumber Daya baik pada indikator Sumber Daya Manusia maupun Non-Manusia. Pada indikator sumber daya manusia, kurangnya personil dalam melakukan pelayanan perizinan. Berikutnya indikator sumberdaya non-manusia yaitu finansial dan sarana/prasarana yang masih belum mencukupi dalam pelaksanaan perwako secara menyeluruh. Berikutnya, pada variabel sosial, ekonomi dan politik. Pada indikator politik, masih belum adanya komitmen dari elit politik dalam upaya untuk mewujudkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Padang.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendelegasian Kewenangan

ABSTRACT

Bayu Pangestu. B, 1210842001, Implementation of Mayor Regulation Number 28 of 2017 on Delegation Authority Integration Service To Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu in Padang City, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Science, Andalas University, Padang, 2019. Guided by: Kusdarini S.IP, M.PA, and Drs. Yoserizal, M.Si. This thesis consist of 180 pages with 10 references, 5 method books, 3 thesis, 3 policy, 1 official department document, 6 internet websites.

In order to realize conducive invest environment, The Central Government issues a policy package to resolve that problem. One of that policy is make a authorized governmental department in invest and one stop service sector. In Padang City the department who have authority is Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. The purpose of DPMPTSP is to cut down bureaucracy that already in permit process. So far, the existing permit are spread in various region department at the Padang City. The policy embodied in Padang Mayor Regulation Number 28 of 2017 on Delegation Authority Integration Service To DPMPTSP. However, the fact realize that one-door integrated service is not effective. There are still many permits scattered in various region department at the Padang City. Based on this phenomenon the researchers are interested to reviewing Implementation of Mayor Regulation Number 28 of 2017 on Delegation Authority Integration Service To DPMPTSP in Padang City.

In this study, researchers used a qualitative research method with descriptive design. Researchers examined the merger policy by using the theory of policy implementation Van Meter dan Van Horn. Researchers use are primary data and secondary data were collected by interview and documentation, and then analyzed using interactive analysis by Miles and Huberman.

The result showed that the implementation of Mayor Regulation Number 28 of 2017 on Delegation Authority Integration Service To Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu in Padang City is not effective. This can be happen because the existing permit based on regulations can't be fully to delegated. The excuses found in variable of resources both on Human Resources and Non-Human Resources. In the indicator of human resources lack of personnel to do permit service make the implementation not effective. After that the indicator of non-human resources is finance and infrastructure far from ideal condition to do mayor regulation completely. The next problem found on variable social, economy and politic. On politic indicator, the lack of commitment political elite to realize One Stop Services at Padang City completely.

Key Word : Implementation, Policy, Delegation Authority